



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Laporan Informasi Laporan Pelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan peraturan. Selain itu, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah di raih dan permasalahan- yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Daerah. Prestasi atau keberhasilan tersebut memacu Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan di pergunakan sebagai evaluasi perbaikan untuk langkah ke depan.

Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah tahun 2020 berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2020 yang meliputi beberapa substansi pelaporana antara lain Dasar Hukum, Gambaran umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah tahun 2020 ini adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah tahun 2020 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, terima kasih Kepada Tim Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanah Laut yang telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan LPPD Sekretariat Daerah tahun 2020.

Pelaihari, Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs.H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum	2
C. Struktur Organisasi.....	4
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	6
A. Visi dan Misi	6
a. Visi.....	6
b. Misi	7
B. Strategi dan Arah Kebijakan	9
BAB III FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH.....	11
3.1 Program dan Kegiatan.....	11
3.2 Kepegawaian	16
3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran	18
3.4 Sarana dan Prasarana.....	19
3.5 Permasalahan dan Solusi.....	19
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH	20
(RKP) TAHUN 2020	
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	21
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	22
A. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang Berhasil ditindaklanjuti	22
B. Kerjasama Sekretariat Daerah dengan Pihak Ketiga	24
C. Permasalahan Pada Kegiatan Tata Batas Antar Daerah yang Berhasil ditindaklanjuti	25
BAB VII PENERAPAN DAN PENYAMPAIAN STANDAR PELAYANAN	27
MINIMAL (SPM)	

BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH	28
a. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020	28
b. Realisasi Capaian Kinerja sesuai Target dalam Renstra Tahun 2020.....	32
c. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	33
d. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	36
BAB IX PENUTUP	42
1. Kesimpulan	42
2. Penghargaan	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

B. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang Sekretariat Daerah. Sedangkan tugas pokok Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Sekretariat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi antara lain :

- 1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Daerah mempunyai tugas:

- a) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e) Pembinaan administrasi pemerintahan, hukum dan organisasi;
- f) Fasilitasi administrasi perekonomian pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- g) Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol serta tata usaha dan keuangan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
 - 2) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Perekonomian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perekonomian;

- b) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sosial Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Pendidikan dan Agama; dan
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
- 1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan; dan
 - c) Sub Bagian Keprotokolan.
 - 2) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga
 - c) Sub Bagian Aset
 - 3) Bagian Tata Usaha dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

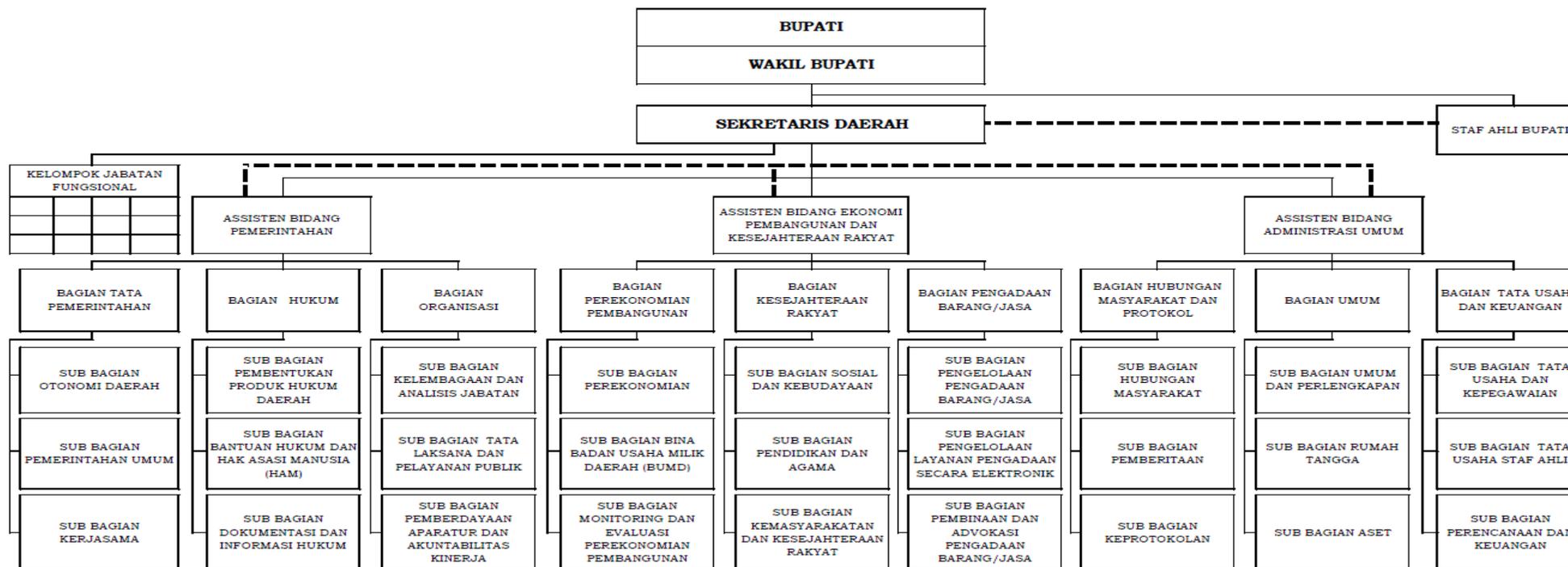
C. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
 Bagan Struktur Organisasi
 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 36 Tahun 2019
 TANGGAL : 02 Mei 2019



KETERANGAN
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

Alfiri
 ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,
 Ttd
 H. SUKAMTA

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 sekaligus menjadi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang “**BERINTERAKSI**”

 **Berkarya**

 **Inovasi**

 **Tertata**

 **Religius**

 **Aktual**

 **Sinergi**

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Sekretariat Daerah diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

b. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi dari pada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maksudnya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin

menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahterannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan

menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan masyarakat.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategis dan arahan kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategis adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan strategis dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah

kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang disajikan pada Tabel T-C. 26 (*data terlampir*).

BAB III

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 dengan 9 bagian, 15 Program dan 46 Kegiatan terdiri dari :

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI	ANGGARAN APBD REFOCUSING	ANGGARAN APBD PERUBAHAN	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
1	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan	1.165.623.700	939.164.200	1.613.792.200	47,74	Tata Pemerintahan
	1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	118.421.700	68.056.700	115.374.700	66,04	
	2 Kegiatan Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum	169.852.100	107.992.600	154.787.600	44,43	
	3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah	877.349.900	763.114.900	1.343.629.900	46,55	
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	217.287.800	82.380.000	212.152.000	74,07	
	4 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai – Nilai Budaya Bangsa	217.287.800	82.380.000	212.152.000	74,07	
3	Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	807.166.540	409.816.840	409.816.840	40,60	Organisasi
	5 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	169.924.800	107.445.800	107.445.800	30,13	
	6 Kegiatan Pembuatan ID Card Pegawai	129.136.600	37.720.800	37.720.800	99,65	

	7	Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	117.210.560	56.090.560	56.090.560	29,47	
	8	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	69.293.020	48.339.020	48.339.020	48,95	
	8	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	246.646.900	121.086.000	121.086.000	38,04	
	9	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	74.954.660	39.134.660	39.134.660	25,97	
4	Program Fasilitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum		1.271.198.000	635.589.200	869.806.500	88,31	Hukum
	10	Kegiatan Fasilitas Produk Hukum	392.329.800	295.479.800	366.442.000	91,88	
	11	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah	439.528.700	234.539.600	313.479.600	85,54	
	12	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	439.339.500	105.569.800	189.884.900	85,97	
5	Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa		1.535.120.780	518.109.060	736.109.060	71,48	Barang/Jasa
	13	Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	206.698.000	189.948.000	311.531.840	86,21	
	14	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	940.588.080	142.923.020	180.954.020	37,75	
	15	Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan	387.834.700	185.238.040	243.623.200	77,69	
6	Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitas Perekonomian Pembangunan Daerah		793.405.120	409.517.620	579.517.620	80,28	Perekonomian Pembangunan

	16	Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	292.269.700	111.669.700	198.751.200	83,34	
	17	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	283.047.460	145.264.960	193.439.060	73,88	
	18	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perekonomian Pembangunan	218.087.960	152.582.960	187.327.360	83,63	
7	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat		22.661.024.850	10.348.030.300	19.774.259.800	68,66	Kesejahteraan Rakyat
	19	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaa Sosail dan Kebudayaan	250.000.000	131.869.000	131.869.000	0,00	
	20	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	18.629.024.850	9.413.100.700	18.485.415.200	73,45	
	21	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Agama	3.782.000.000	803.060.600	1.156.975.600	0,00	
8	Program Kerjasama Informasi dan Mass Media		2.603.640.000	1.222.309.300	2.392.390.200	72,56	Humas dan Keprotokolan
	22	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	2.603.640.000	1.222.309.300	2.392.390.200	72,56	
9	Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan		826.890.000	496.572.800	1.037.567.900	55,61	
	23	Kegiatan Pengembangan Hubungan Masyarakat	321.817.600	196.393.400	586.311.700	46,68	
	24	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permanen Pembangunan	125.000.000	0	71.183.800	0,00	
	25	Fasilitasi dan Pelayanan Protokoler Pemerintah	380.072.400	300.179.400	380.072.400	79,82	

		Daerah					
10		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.546.688.660	2.176.514.460	3.479.413.560	64,72	Umum
	26	Kegiatan Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	3.427.188.660	2.116.889.460	3.356.913.560	63,73	
	27	Kegiatan Penyusunan Tabulasi Aset Daerah	119.500.000	59.625.000	119.500.000	92,57	
11		Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	7.185.813.818	4.853.182.218	9.830.296.625	79,17	
	28	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prarana Perkantoran	386.091.000	290.413.400	2.625.542.724	86,90	
	29	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3.440.087.818	2.757.897.818	3.796.123.591	70,74	
	30	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	2.076.898.000	1.240.064.000	1.240.064.000	82,74	
	31	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	454.372.000	14.722.000	690.098.600	82,91	
	32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/Dinas	383.645.000	323.365.000	493.665.000	56,63	
	33	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	444.720.000	226.720.000	329.321.710	89,05	
12		Program Fasilitas Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH	4.210.680.000	2.077.760.000	2.221.000.000	77,38	
	34	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Jasa Bagi KDH/WKDH	75.000.000	59.000.000	75.000.000	98,27	
	35	Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi KDH/WKDH	2.798.000.000	890.000.000	890.000.000	68,91	
	36	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan	1.137.680.000	1.028.760.000	1.056.000.000	96,52	

	37	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	200.000.000	100.000.000	200.000.000	6,20	
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.662.303.014	4.407.131.423	5.190.124.423	89,24	Tata Usaha dan Keuangan
	38	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	5.209.173.814	1.526.352.223	1.802.745.223	99,16	
	39	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	3.387.379.200	2.880.779.200	3.387.379.200	83,96	
	40	Kegiatan Fasilitas Kegiatan Staf Ahli Bupati	65.750.000	0	0	0,00	
14	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		281.250.000	0	20.000.000	0,00	
	41	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	75.000.000	0	20.000.000	0,00	
	42	Kegiatan Penagdaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	206.250.000	0	0	0,00	
15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		78.162.300	39.634.100	61.521.100	23,37	
	43	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	45.800.000	30.760.000	40.550.000	16,68	
	44	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	13.312.300	5.274.100	10.171.100	45,35	
	45	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	19.050.000	3.600.000	10.800.000	27,78	

3.2 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, didukung oleh sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2020

NO	BAGIAN	GOLONGAN																JML
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																1
2	Asisten Sekda		3															3
3	Staf Ahli		3															3
4	Tata Pemerintahan				1	1	1	1	2		2							8
5	Hukum			1		1	1	1	1									5
6	Organisasi			1		2		1	1									5
7	Pengadaan Barang Jasa				1	5	6	2	2	1	4							21
8	Perekonomian Pembangunan					2	1	2		1								6
9	Kesejahteraan Rakyat			1		1	2		1	3								8
10	Umum				1	1	1	1	2	5	3	2	1	1		1		19
11	Tata Usaha dan Keuangan			1		2			2	3	4		1					13
12	Humas dan Protokol				1		1	2	5	2	2							13
JUMLAH		1	6	4	4	15	13	10	16	15	15	2	2	1	0	1	-	105

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN								
		S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah	1								1
2	Asisten Sekda	3								3
3	Staf Ahli	1	2							3
4	Tata Pemerintahan	2	4				2			8
5	Hukum	1	4							5
556	Organisasi	1	4							5
72121	Pengadaan Barang Jasa	2	13		5		1			21
86	Perekonomian Pembangunan		4		1		1			6
98	19Kesejahteraan Rakyat	1	4		1		2			8
10	U13mum		4		2		11	1	1	19
11	Tata13 Usaha dan Keuangan		4	1	1		6		1	13
12	Humas dan Protokol	1	3	2	1	1	5			13
JUMLAH		13	46	3	11	1	28	1	2	105

NO	GOLONGAN	KUALIFIKASI/PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IV/d	S.2	1
2	IV/c	S.2	4
		S.1	2
331	IV/b	S.2	3
		S.1	1
4	IV/a	S.2	2
		S.1	2
5	III/d	S.2	2
		S.1	14
6	III/c	S.2	2
		S.1	11
7	III/b	S.1	5
		D.IV	1
		SLTA	3
8	III/a	S.1	9
		D.IV	3
		D.III	4
		D.II	1
		SLTA	1

9	II/d	D.III	4
		SLTA	11
10	II/c	D.III	3
		SLTA	12
11	II/a	SLTA	1
		SD	1
12	I/d	SD	1
13	I/b	SD	1
JUMLAH			105

Jumlah berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural
per 31 Desember 2020

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	FORMASI	TERISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Eselon II.A	1	1
2.	Eselon II.B	6	6
3.	Eselon III.A	9	9
4.	Eselon IV	25	23
Jumlah PNS		41	39

3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Pemerintahan	1.825.944.200,00	927.510.944,00	50,80
2	Hukum	869.806.500,00	768.082.800,00	88,31
3	Organisasi	409.816.840,00	166.373.300,00	40,60
4	Perekonomian Pembangunan	579.517.620,00	465.215.760,00	80,28
5	Pengadaan Barang dan Jasa	736.109.060,00	526.167.266,00	71,48
6	Kesejahteraan Rakyat	19.774.259.800,00	13.577.500.000,00	68,66
7	Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	3.429.958.100,00	2.312.841.802,00	67,43
8	Umum	15.530.710.185,00	11.753.013.527,00	75,68
9	Tata Usaha dan Keuangan	5.271.645.523,00	4.645.911.295,00	88,13
Jumlah		48.427.767.828,00	35.142.616.694	

3.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana yang dipergunakan di Sekretariat Daerah dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2020 telah mencukupi dan memadai sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik, Namun akan terus diupayakan peningkatan kearah yang lebih bagus terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Ruang (KIR) terlampir dalam bentuk (*data terlampir*).

3.5 Permasalahan dan Solusi

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari segi pemakaian kekayaan daerah, antara lain dengan :

- a. Mengusulkan kenaikan sewa kantin Sekretariat Daerah dengan menyesuaikan kondisi yang berjalan
- b. Memaksimalkan pemakaian gedung *Islamic Center* dengan kembali dikelola oleh bagian Umum Sekretariat Daerah
- c. Mengusulkan untuk pemakaian gedung dibuat sewa sepaket dengan peralatannya karena dalam Peraturan Daerah sewa kursi dan sound sistem tersendiri
- d. Mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 atas pemakaian kendaraan yang ada di Setda terutama dari segi trayek
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka kelancaran/kemudahan pelaksanaan tugas.

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2020

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang Berhasil Ditindaklanjuti

Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti pada tahun 2020 adalah 175%, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 100%. Kegiatan ini dapat melampaui target dikarenakan di Tahun 2020 terdapat peningkatan yang signifikan terkait penyusunan Dokumen Kerjasama di SKPD karena realisasi kegiatan di Anggaran Perubahan maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Program/Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 115.374.700,- dan realisasi sebesar Rp 76.199.000,- (66,04%).

B. Kerjasama Sekretariat Daerah dengan Pihak Ketiga

Bagian yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KEPROTOKOLAN

a. Mitra yang diajak kerjasama:

- 1) PT. Kartya Banjar Sejahtera (SKH. Kalimantan Post)
- 2) PT. Wahana Media (SKH. Barito Post)
- 3) PT. Cahaya Media Utama (SKH. Mata Banua)
- 4) PT. Grafika Wangi Kalimantan (SKH. Banjarmasin post)
- 5) PT. Duta Banua Banjar (SKH. Radar Banjarmasin)
- 6) LPP TVRI Kalimantan Selatan
- 7) PT. Duta Televisi Indonesia (Duta TV)
- 8) Tabloid Aktual

b. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah.
- 3) Perda Nomor 16 Tahun 2013 Perubahan pertama atas Perda Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut.

c. Bidang Kerjasama

Kerjasama penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan media cetak dan elektronik melalui pembuatan Laporan/Liputan Khusus Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut , *greeting* gema ramdhan, Idul Fitri. dan Idul Adha serta kontrak pemuatan berita di media cetak dan kontrak penayangan berita di media elektronik dan *online*.

d. Nama Kegiatan

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

e. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

f. Sumber dan Jumlah Anggaran

- 1) Anggaran bersumber dari : APBD Kabupaten Tanah Laut TA 2020
- 2) Besarnya anggaran untuk publikasi media cetak dan elektronik adalah Rp 1.794.795.240,-.
- 3) Realisasi sebesar adalah Rp 1.757.340.000,- atau sebesar 97,91%.

g. Jangka Waktu Kerjasama

- 1) Kontrak pemuatan dan penayangan berita dikerjasamakan dengan media cetak dan elektronik selama 12 (dua belas) bulan mulai Januari s/d Desember 2019 .
- 2) Pemuatan Lapsus Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dikerjasamakan selama 10 hari kalender.
- 3) *Greeting* gema ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha di bulan ramadhan .
- 4) Hasil *output* kerjasama.

- 5) Tersebarluasnya informasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan hasil-hasil pembangunan di media cetak dan elektronik.
 - 6) Terisolasinya pelaksanaan pembangunan melalui Laporan/Liputan Khusus Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut di sejumlah media cetak dan siaran melalui media TV dan Radio RRI.
 - 7) Tersampainya *greeting* ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ke seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut .
- h. Permasalahan dan Solusi
- Tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya.

2. BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN

1. Mitra yang diajak kerjasama :
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Indonesia Banjarmasin.
 - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Dasar Hukum
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Indonesia Nomor : 500/01/PKS/Perekobang/2020 dan Nomor : 014/STIEI/MoU/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020.
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 500/02-Perekobang/XII/2020 dan Nomor : 1388/UN.1.12/KS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020
3. Bidang Kerjasama
 - a. Penyusunan kajian/analisa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada BUMD PT. BPR Tanah Laut.
 - b. Penyusunan kajian/analisa Kelayakan Oprasional dan Usaha BUMD PD. Baratala Tuntung Pandang.
 - c. Penyusunan Analisa Evaluasi Program Gapura Karomah
 - d. Penyusunan Mitigasi Resiko Program Gapura Karomah

4. Sumber Dana yang Digunakan

- a. Anggaran penyusunan kajian/analisa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada BUMD PT. BPR Tanah Laut dan Penyusunan kajian / analisa Kelayakan Oprasional dan Usaha BUMD PD. Baratala Tuntung Pandang dibebankan pada DPA SKPD Sekeretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan Pada Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitai Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp 84.830.000,- dengan realisasi 100%
- b. Anggaran penyusunan Analisa Evaluasi Program Gapura Karomah dan Penyusunan Mitigasi Resiko Program Gapura Karomah dibebankan pada DPA SKPD Sekeretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan Pada Kegiatan Pembinaan, Fasilitai dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp 42.500.000,- dengan realisasi Rp 40.000.000,- atau sebesar 94,11%

5. Hasil (output) Kerjasama

Output dari kerjasama tersebut adalah tersusunnya dokumen analisa kelayakan dan dokumen evaluasi program pemerintah yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pimpinan.

C. Permasalahan Pada Kegiatan Tata Batas Antar Daerah yang Berhasil Ditindaklanjuti

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan :

1. Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut.
2. pengecekan dilapangan dengan berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan.
3. Melaksanakan rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten dan mengikuti rapat koordinasi fasilitasi Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Melakukan inventarisasi data-data dukung terkait wilayah yang terdapat konflik, khususnya di Desa Bentok Darat yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar di Desa Kiram.

Kegiatan-kegiatan pada Penegasan Batas Daerah yakni di 2 (dua) kasus atau segmen batas yaitu :

- Kabupaten Tanah Laut di Desa Bentok Darat dan Kabupaten Banjar di Desa Kiram.
- Kabupaten Tanah Laut di Desa Bumi Makmur dan Kabupaten Banjar.

Permasalahan di kedua segmen batas tersebut terlaksana dengan baik karena telah disepakati kedua Kabupaten yang ditandai dengan ditanda tangannya Berita Acara Penegasan Batas Daerah pada Tahun 2020, sehingga Persentase Permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti adalah 100%.

Adapun Program/Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengaman Batas Daerah dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 115.374.700,- dan realisasi sebesar Rp 76.199.000,- (66,04%).

BAB VII

PENERAPAN DAN PENYAMPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

a. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembaga/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudkan komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang telah disepakati baik oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dan Pelaksana Lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Lingkup Sekretariat Daerah Tahun 2020 (data terlampir).

b. Realisasi Capaian Kinerja sesuai Target dalam Renstra Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI I : BERKARYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA						
ESELON II						
1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,075	<i>Masih dalam tahap penilaian</i>	Masih dalam tahap penilaian	Sekda dan Bagian Tapem
ESELON III						
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, otonomi daerah dan kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil ditindaklanjuti	100%	82%	82%	Bagian Tapem
		Persentase Pemenuhan IKK	100%	100%	100%	

		Persentase permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
		Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	175%	175%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI II : MENCIPTAKAN INOVASI DI SEGALA SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF						
ESELON II						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten	BB 74,00	B 64,89	91,4%	Sekda dan Bagian Organisasi
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	5	500%	
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	70%	92,5%	132,5%	Bagian Organisasi
2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal cukup	20%	62,5%	312,5%	
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	15%	Masih dalam proses perhitungan	Masih dalam proses perhitungan	
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	95%	95%	
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	
		Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya	100%	100%	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI III : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)						
ESELON II						
1	Meningkatnya kualitas Pengadaan barang/jasa lingkup Kabupaten	Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	100%	100%	100%	Sekda dan Bagian PBJ
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian PBJ
ESELON III						
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	100%	100%	100%	Bagian Hukum
2	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	Bagian Hukum
3	Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Dirainya predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM	Nilai 75	Nilai 79,64	100%	Bagian Hukum
4	Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	100%	100%	100%	Bagian Hukum
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan
		Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	86,83%	86,83%	Bagian Umum

2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	100%	92,57%	92,57%	Bagian Umum
ESELON III						
	Meningkatnya layanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Pimpinan/Bagian lingkup Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	Bagian TU dan Keuangan
	Meningkatnya kualitas pelaporan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan mutu penyusunan pelaporan/kinerja yang tepat waktu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Bagian TU dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI IV : MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS RELIGIUSITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT						
ESELON II						
1	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Persentase lembaga keagamaan yang aktif dalam pembinaan umat	100%	100%	100%	Sekda dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan untuk kesejahteraan rakyat	Persentase layanan keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	86%	86%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	99,51%	99,51%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
ESELON III						
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan hari besar Nasional/Kabupaten	2	2	100%	Bagian Tapem

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI V : MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
ESELON II						
1	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	Sekda dan Bagian Perekonomian Pembangunan
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Presentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian Pembangunan

c. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI I : BERKARYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA						
ESELON II						
1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	<i>Masih dalam tahap penilaian</i>	<i>Masih dalam tahap penilaian</i>	Sekda dan Bagian Tapem
ESELON III						
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, otonomi daerah dan kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil ditindaklanjuti	100%	82%	82%	Bagian Tapem
		Jumlah Pemenuhan IKK	623	100%	100%	
		Jumlah permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	2	100%	100%	
		Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	3	175%	175%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI II : MENCIPTAKAN INOVASI DI SEGALA SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF						
ESELON II						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten	64,89	B 64,89	91,4%	Sekda dan Bagian Organisasi
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	5	5	500%	
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	6,5%	92,5%	132,5%	Bagian Organisasi
2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal cukup	12,5%	62,5%	312,5%	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	5%	<i>Masih dalam proses perhitungan</i>	<i>Masih dalam proses perhitungan</i>	Bagian Organisasi
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	95%	95%	Bagian Organisasi
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
		Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya	100%	100%	100%	Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI III : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)						
ESELON II						
1	Meningkatnya kualitas Pengadaan barang/jasa lingkup Kabupaten	Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	63%	100%	100%	Sekda dan Bagian PBJ
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian PBJ
ESELON III						
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	1.333	100%	100%	Bagian Hukum
2	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	4	100%	100%	Bagian Hukum
3	Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Diraihnya predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM	1	Nilai 79,64	Nilai 79,64	Bagian Hukum
4	Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	450	100%	100%	Bagian Hukum
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan
		Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan

ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	86,83%	86,83%	86,83%	Bagian Umum
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	68,65%	92,57%	92,57%	Bagian Umum
ESELON III						
	Meningkatnya layanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Pimpinan/Bagian lingkup Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	Bagian TU dan Keuangan
	Meningkatnya kualitas pelaporan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan mutu penyusunan pelaporan/kinerja yang tepat waktu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Bagian TU dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI IV : MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS RELIGIUSITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT						
ESELON II						
1	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Persentase lembaga keagamaan yang aktif dalam pembinaan umat	100%	100%	100%	Sekda dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan untuk kesejahteraan rakyat	Persentase layanan keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	86%	86%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	99,84%	99,84%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
ESELON III						
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan hari besar Nasional/Kabupaten	2	2	100%	Bagian Tapem

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI V : MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
ESELON II						
1	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	Sekda dan Bagian Perekonomian Pembangunan
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase Permasalahan yang berhasil ditindaklanjuti di bidang pengembangan Potensi Perekonomian	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian Pembangunan

d. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja untuk sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi **meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama antar pemerintahan** dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah, dengan realisasi capaian kinerja 66,04%.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum, dengan realisasi capaian kinerja 66,04%.
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah, dengan realisasi capaian kinerja 46,55%.

2. Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi **optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup pemerintah daerah** dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengembangan dan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan realisasi capaian 48,95%.
- 2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan; dengan realisasi capaian kinerja 38,04%.
- 3) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dengan realisasi capaian kinerja 25,97%.
- 4) Kegiatan Pembuatan ID Card Pegawai, dengan realisasi capaian kinerja 99,65%.
- 5) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja, dengan realisasi capaian kinerja 30,13%.
- 6) Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan realisasi capaian kinerja 29,47%.

3. Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi ***penguatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ*** dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan layanan pengadaan secara elektronik, dengan realisasi capaian kinerja 86,21%.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan realisasi capaian kinerja 37,75%.
- 3) Kegiatan Pembinaan kompetensi dan evaluasi pelaporan, dengan realisasi capaian kinerja 77,69%.

4. Program Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi ***peningkatan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah, peningkatan penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa hukum dan HAM, serta pendokumentasian dan publikasi produk hukum daerah*** dengan di dukung oleh kegiatan :

Pengembangan dan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;

- 1) Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah, dengan realisasi capaian kinerja 91,88%.

- 2) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah, dengan realisasi capaian kinerja 85,54%.
- 3) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan realisasi capaian kinerja 85,97%

5. Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi **peningkatan kualitas dan kuantitas pemberitaan, publikasi dan keprotokolan** dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Kegiatan pengembangan hubungan masyarakat, dengan realisasi capaian kinerja 46,68%.
- 2) Kegiatan pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan, dengan realisasi capaian kinerja 0%.
- 3) Kegiatan fasilitasi dan pelayanan protokoler pemerintah daerah, dengan realisasi capaian kinerja 79,82%.

6. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi **peningkatan kerjasama penyebaran informasi antara media massa dengan pemerintahan daerah** dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah, dengan realisasi capaian kinerja 72,56%.

7. Program Fasilitasi Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi: **Optimalisasi layanan kedinasan bagi Bupati dan Wakil Bupati** dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Kegiatan penyediaan perlengkapan dan jasa bagi KDH/WKDH, dengan realisasi capaian kinerja melalui :
 - a. Penyediaan Perlengkapan dan jasa bagi KDH/WKDH dengan realisasi capaian kinerja 98,27%.
 - b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi KDH/WKDH dengan realisasi capaian kinerja 68,91%.
 - c. Penyediaan makanan dan minuman rumah jabatan dengan realisasi capaian kinerja 96,52%.
 - d. Pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH dengan realisasi capaian kinerja 6,20%.

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi:

Penguatan pelayanan administrasi perkantoran, dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyusunan Tabulasi aset Daerah, dengan realisasi capaian kinerja 92,57%.
- 2) Kegiatan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan, dengan realisasi capaian kinerja 63,73%.

9. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi ***Peningkatan saran/prasarana gedung kantor dan rumah jabatan/dinas***, dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dengan realisasi capaian kinerja 86,90%.
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan realisasi capaian kinerja 70,74%.
- 3) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan realisasi capaian kinerja 98,33%.
- 4) Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi capaian kinerja 82,74%.
- 5) Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan realisasi capaian kinerja 82,91%.
- 6) Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan/dinas 56,63%.
- 7) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas dengan realisasi capaian kinerja 89,05%.

10. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi ***penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah***, dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD, dengan realisasi capaian kinerja 16,68%.
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan, dengan realisasi capaian kinerja 45,35%.

- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja, dengan realisasi capaian kinerja 27,78%

11. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi ***peningkatan kompetensi dan sarana/prasarana aparatur***, dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Peningkatan kemampuan teknis aparatur, dengan realisasi capaian kinerja 0%.
- 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan realisasi capaian kinerja 0%.

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi ***penguatan pelayanan administrasi perkantoran***, dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD, dengan realisasi capaian kinerja 83,96%.
- 2) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi, dengan realisasi capaian kinerja 99,16%.

13. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi ***peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya daerah***, dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Sosial dan Kebudayaan, dengan realisasi capaian kinerja 0%.
- 2) Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, dengan realisasi capaian kinerja 73,45%.
- 3) Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Agama dengan realisasi capaian kinerja 0%.

14. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi ***peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya daerah***, dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Budaya Bangsa, dengan realisasi capaian kinerja 61,20%.

15. Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitas Perekonomian Pembangunan Daerah

Program tersebut di atas dilaksanakan melalui strategi ***peningkatan kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan pembangunan daerah***, dengan di dukung oleh kegiatan :

- 1) Peningkatan, fasilitasi dan pengembangan potensi perekonomian daerah, dengan realisasi capaian kinerja 83,34%.
- 2) Pembinaan, pengembangan dan fasilitasi Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan realisasi capaian kinerja 73,88%.
- 3) Monitoringa, evaluasi dan pelaporan perekonomian pembangunan, dengan realisasi capaian kinerja 83,63%.

BAB IX

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan LKPj kepada DPRD telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, atas Laporan kemajuan yang telah dicapai.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menciptakan tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Sekretariat Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, yang dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2020.

2. Penghargaan

Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut :

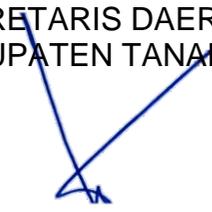
- 1) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemerintah Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2019, Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan

sistem JDIHN (jdihn.go.id) pada Tahun 2020, Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN pada Tahun 2020, Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pelaihari, Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs.H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012